

2016

MODUL PENDIDIKAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI SECARA PARTISIPATIF DI AKADEMI KEBIDANAN DI JAWA TENGAH

(Studi di Akademi Kebidanan di Provinsi Jawa Tengah)

TIM PENYUSUN :

**Dr. dr. Sutopo Patria Jati, MM., M.Kes
Eka Yunila Fatmasari, SKM, M.Kes
Murti Wuryani, S.Si.T, M.Kes
Redhita Rizky Shantania Putri, SKM**

**MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



RINGKASAN

Fenomena praktik korupsi pada profesi bidan makin meluas di beberapa daerah di Indonesia yang merupakan tindakan profesi bidan yang tidak berintegritas. Cerminan dari perilaku tersebut merupakan realita yang selama ini terjadi pada profesi bidan. Sampai saat ini kurikulum pendidikan anti korupsi dan integritas bagi profesi kesehatan bidan masih sangat terbatas. Kebutuhan pendidikan integritas sebagai kurikulum bagi pengelola akademi kebidanan untuk menyiapkan calon profesi bidan dirasakan semakin mendesak seiring dengan makin banyaknya praktik korupsi yang dilakukan pada sektor kesehatan. Disisi lain, upaya pengembangan modul pendidikan integritas dan antikorupsi dalam bidang kesehatan yang telah dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro (TIRI) dapat menjadi acuan bagi pembuatan replikasi modul yang akan dikembangkan di seluruh akademi kebidanan di Jawa Tengah untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Tahapan yang digunakan untuk pengembangan model dimulai dari tahap pertama, yaitu menganalisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) dan menyusun strategi pengembangan replikasi modul menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dengan partisipan sebanyak 12 peserta dari masing-masing perwakilan akademi kebidanan di Jawa Tengah. Tahap kedua, membuat prototipe modul pendidikan integritas dan anti korupsi secara partisipatif bagi calon bidan di akademi kebidanan di Jawa Tengah dengan metode Workshop yang diikuti oleh 12 peserta dari perwakilan akademi kebidanan dan 3 peserta dari perwakilan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jawa Tengah. Tahap ketiga, menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam ujicoba penerapan prototipe modul pendidikan integritas dan anti korupsi bagi calon bidan di satu akademi kebidanan milik pemerintah dan satu akademi kebidanan milik swasta di Kota Semarang yang sudah siap atau *cooperative*.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat & karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan "**MODUL PENDIDIKAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI SECARA PARTISIPATIF DI AKADEMI KEBIDANAN DI JAWA TENGAH (Studi di Akademi Kebidanan di Provinsi Jawa Tengah)**" sebagai bagian dalam upaya pengembangan kebutuhan kurikulum pendidikan anti korupsi dan integritas bagi calon profesi kesehatan bidan.

Tujuan dari penyusunan **MODUL PENDIDIKAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI** adalah sebagai pedoman bagi pengelola akademi kebidanan untuk menghasilkan calon lulusan kebidanan yang mampu melaksanakan tugas dalam memenuhi pelayanan kebidanan sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya bagi individu, keluarga dan masyarakat, memiliki moral, etika dan integritas tinggi serta berkepribadian dan berperilaku profesional.

Penyelenggaraan pengembangan pendidikan anti korupsi dan integritas ini didukung pula dengan kesesuaian dari kurikulum pendidikan kebidanan yang memiliki visi, "*Menghasilkan Lulusan Kebidanan yang Kompeten*" serta misinya, "*Menyelenggarakan Pendidikan Kebidanan yang Berkualitas dalam Upaya Mempersiapkan Bidan Pelaksana yang Kompeten, Bermoral Tinggi dan Berkepribadian Indonesia dalam Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebidanan bagi Individu, Keluarga dan Masyarakat*". Hal tersebut tercantum di Kurikulum Kebidanan, SK No. HK. 02.05/I/III/2/08794/2011, tanggal 22 Desember 2011.

Dengan tersusunnya **MODUL PENDIDIKAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI** ini, maka dapat menjadi arahan serta acuan bagi seluruh civitas akademika dan pengelola akademi kebidanan untuk mengembangkan pendidikan anti korupsi dan integritas di lingkungan akademi kebidanan. Hal tersebut didukung pula dengan kerjasama organisasi profesi dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil pendidikan yang telah diperoleh oleh calon bidan selama ini dalam menerapkannya di masyarakat.

Kami mengharapkan masukan dan saran demi penyempurnaan modul ini. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini.

Semarang, 20 April 2015

Ketua Tim Penyusun



Dr. dr. Sutopo Patria Jati MM., M.Kes

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pengembangan Modul	1
B. Tujuan Pengembangan Modul	3
C. Manfaat Pengembangan Modul	3
D. Tahapan Pengembangan Modul	4
BAB II PENGANTAR PENDIDIKAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI DI INSTITUSI AKADEMI KEBIDANAN	
PERTEMUAN KE-1	
A. Sesi I : Pre Test	6
B. Sesi II : Review Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi di Institusi Akademi Kebidanan	8
C. Sesi III : Diskusi Kelompok (Metode Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi di Akademi Kebidanan)	15
D. Sesi IV : Pemaparan Hasil Diskusi Kelompok	20
E. Sesi V : Penutup dan Evaluasi	22
BAB III ORIENTASI PENDALAMAN KONSEP PENDIDIKAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI BAGI MAHASISWA AKADEMI KEBIDANAN	
PERTEMUAN KE-2	
A. Sesi I : Review Pertemuan Ke-1	25
B. Sesi II : Pendalaman Studi Kasus Integritas dan Anti Korupsi di Akademi Kebidanan (Empat Kasus <i>Continuum of Care</i>)	27
C. Sesi III : Presentasi Kelompok dan Tanya Jawab	30
D. Sesi IV : Evaluasi dan Penutup	32

BAB IV PRAKTIK PENGENALAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI DALAM
PENDIDIKAN DI AKADEMI KEBIDANAN

PERTEMUAN KE-3

- A. Sesi I : Review Pertemuan Ke-2 35
- B. Sesi II : Diskusi Internal Kelompok 37
- C. Sesi III : *Role Playing* 38
- D. Sesi IV : Kesimpulan dan Evaluasi 40

BAB V REVIEW PENDALAMAN PRAKTIK INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI
DALAM PENDIDIKAN DI AKADEMI KEBIDANAN

LANJUTAN PERTEMUAN KE-3

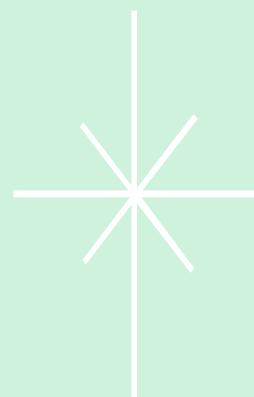
- A. Sesi V : Preview Outline Praktik Integritas dan Anti Korupsi
dalam Pendidikan Akademi Kebidanan 42
- B. Sesi VI : *Brainstorming* dan Analisis Kasus Praktik Integritas dan
Anti Korupsi dalam Pendidikan Akademi Kebidanan 45
- C. Sesi VII : Review Hasil Analisis Kasus dan Tanya Jawab 47
- D. Sesi VIII : Rencana Tindak Lanjut dan Evaluasi (Post Test) 49

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan 51
- B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertemuan I	5
Tabel 1.2 Pertemuan II.....	24
Tabel 1.3 Pertemuan III (Part 1)	34
Tabel 1.4 Pertemuan III (Part 2)	41
Tabel 1.5 Outline Praktik Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi	43

di Institusi Akademi Kebidanan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Pengembangan Modul Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi	4
Gambar 2.1 Kasus Penyimpangan oleh Bidan.....	13
Gambar 5.1 Model Praktik Asuhan Kebidanan	44
Gambar 5.2 Sistematika <i>Problem Solving</i> Permasalahan Integritas dan Anti Korupsi	46
Gambar 5.3 Alur Sistematika Penyusunan Draft RTL Uji Coba Modul	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kurikulum Akademik Pendidikan Kebidanan
2. GBPP dan SAP Pendidikan Kebidanan
3. Hasil Pertemuan “Workshop Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi Kebidanan”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengembangan Modul Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi

Kesehatan merupakan salah satu dari unsur kesejahteraan umum yang perlu diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, menyangkut fisik, mental, maupun sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah dan berkesinambungan (Kemenkes, 2007). Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang mencerminkan status kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan derajat KIA perlu dilakukan guna menekan angka kematian tersebut, termasuk dengan menyediakan tenaga bidan profesional yang mencukupi melalui suatu bentuk pengelolaan pendidikan kebidanan yang berkualitas pula (Depkes, 2000).

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah sebesar 104,97 per 100.000 KH dan meningkat menjadi 116,01 per 100.000 KH pada tahun 2011. Pada tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) meningkat menjadi 116,36 per 100.000 KH. Angka kematian Ibu (AKI) tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dikontribusi dari daerah-daerah, antara lain Brebes, Tegal, Pemalang, Cilacap, Grobogan, Banyumas, Pekalongan dan Batang. (Dinkes Propinsi Jateng, 2012).

Sesuai juknis Jampersal Tahun 2012, menyatakan bahwa dana penggantian persalinan normal sebesar Rp. 500.000,00. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Namun, pada kenyataannya masih banyak bidan yang melakukan pungutan liar pada pasien jampersal. Kasus praktek korupsi yang pernah terjadi di beberapa daerah yaitu dugaan praktek pungutan liar (pungli) oleh bidan desa terjadi di Desa Waru Kecamatan Baki. Kasus menyebabkan seorang warga miskin setempat ditarik uang Rp 200.000 saat melahirkan melalui program jaminan persalinan (jampersal). Padahal sesuai program pemerintah jampersal gratis. (Anonim, Jogja).

Selain itu kasus praktek korupsi yang terjadi di Riau terkait jampersal, yaitu bidan R. Eriani, bidan di Pustu Sungai Raya, memungut biaya persalinan dari Rp 400.000 s.d Rp 700.000 walaupun Jampersal (Jaminan Persalinan), padahal miskin dan kaya sudah didanai pemerintah Rp 420 ribu. Begitu juga di desa Sungai Baung yang juga dipungut biaya persalinan oleh bidan desa. (Hermanto, Riau). Adapun kasus kematian remaja karena praktik aborsi yang dilakukan oleh bidan di Kediri. Bidan diduga menyanggupi melakukan aborsi dengan imbalan senilai Rp. 2.100.000,00 (Hari Tri Warsono, 2008). Kasus tersebut merupakan tindakan profesi bidan yang tidak berintegritas. Cerminan dari perilaku tersebut merupakan realita yang terjadi pada profesi bidan.

Korupsi sering dilihat sebagai salah satu alasan utama peningkatan dalam pembiayaan kesehatan yang tidak selalu dapat memberikan output kesehatan yang lebih baik. Hal tersebut yang menjadi penyebab ineffisiensi yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan dan kinerja sistem kesehatan. Korupsi skala besar maupun skala kecil akan meracuni sumber daya dan memperburuk *outcome* kesehatan dan dapat menyebabkan morbiditas serta mortalitas yang lebih besar.(WHO, 2010).

Pendidikan karakter sangat ditentukan oleh tegaknya pilar karakter dan metode yang digunakan. Hal ini penting sebab tanpa adanya identifikasi karakter, pendidikan karakter hanya akan menjadi sebuah petualangan tanpa tujuan. Untuk membentuk manusia berkarakter, aspek kognisi harus dikuatkan oleh aspek emosi. Pendidikan karakter dinilai berhasil apabila anak telah menunjukkan habit atau kebiasaan berperilaku baik. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus ditanamkan melalui cara-cara yang logis, rasional dan demokratis (Koesoema, 2007).

Upaya pengembangan modul pendidikan integritas dan antikorupsi dalam bidang kesehatan yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro (TIRI) dapat menjadi alternatif replikasi modul untuk dapat menjawab kebutuhan tersebut untuk seluruh Akademi Kebidanan di Jawa Tengah. Upaya pengembangan modul pendidikan integritas dan antikorupsi bagi calon bidan didukung dengan sudah adanya modul pendidikan integritas dan antikorupsi terintegrasi yang dibuat peneliti Tahun 2012. Tahun 2014, Kementerian Kesehatan RI juga mengembangkan modul pendidikan anti korupsi untuk calon pegawai Kemenkes. Sehingga kebutuhan pendidikan integritas sebagai kurikulum bagi pengelola akademi kebidanan untuk menyiapkan calon profesi bidan dirasakan semakin mendesak seiring dengan kebutuhan calon tenaga kesehatan yang antikorupsi sebagai persyaratan calon pegawai Kemenkes dan makin banyaknya praktik korupsi yang dilakukan pada sektor kesehatan.

B. Tujuan Pengembangan Modul Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi

1. Tujuan Umum

Sebagai alternatif replikasi modul pendidikan integritas dan anti korupsi secara partisipatif di akademi kebidanan di Jawa Tengah.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam pengembangan replikasi modul pendidikan integritas dan anti korupsi di akademi kebidanan di Jawa Tengah.
- b. Menyusun strategi pengembangan replikasi modul pendidikan integritas dan anti korupsi berdasarkan analisis SWOT di akademi kebidanan di Jawa Tengah.
- c. Membuat prototipe modul pendidikan integritas dan anti korupsi secara partisipatif bagi calon bidan di akademi kebidanan di Jawa Tengah.
- d. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat ujicoba penerapan prototipe modul pendidikan integritas dan anti korupsi bagi calon bidan di akademi kebidanan di Jawa Tengah.
- e. Membuat rekomendasi untuk perbaikan dan penyelesaian akhir modul pendidikan integritas dan anti korupsi bagi calon bidan di akademi kebidanan di Jawa Tengah.

C. Manfaat Pengembangan Modul Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi

Menjadi pedoman pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan integritas dan anti korupsi bagi seluruh Akademi Kebidanan di Jawa Tengah. Selain itu, dengan adanya modul ini dapat berguna untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan calon bidan dalam berperilaku dan memberikan pelayanan kesehatan yang berintegritas dan menerapkan budaya anti korupsi di lingkungan sekitar.

D. Tahapan Pengembangan Modul Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi

- a. Membuat prototipe modul pendidikan integritas dan anti korupsi secara partisipatif bagi calon bidan di Akademi Kebidanan Jawa Tengah dengan **Metode Workshop** yang diikuti oleh 12 wakil Akademi Kebidanan dari 6 eks karesidenan dan 3 wakil dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jawa Tengah. *Workshop* ini bertujuan untuk melakukan *need assessment* dan merangcang draft modul pendidikan integritas dan anti korupsi bagi calon bidan di Akademi Kebidanan Jawa Tengah.
- b. Melakukan ujicoba penerapan prototipe modul pendidikan integritas dan anti korupsi bagi calon bidan di satu akademi kebidanan milik pemerintah dan satu akademi kebidanan milik swasta di Kota Semarang yang sudah siap ataupun *cooperative* di dalam penyelenggaraan ujicoba.
- c. Tahap perbaikan draft modul pendidikan integritas dan anti korupsi bagi calon bidan berdasarkan hasil dari ujicoba penerapan.
- d. Penyelesaian akhir modul pendidikan integritas dan anti korupsi bagi calon bidan di Akademi Kebidanan Jawa Tengah.



Gambar 1.1 Tahapan Pengembangan Modul Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi

**TABEL JADWAL PELAKSANAAN FASILITASI PENDIDIKAN
INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI DI AKADEMI KEBIDANAN**

TABEL 1.1 PERTEMUAN I :

No.	Sesi Kegiatan	Durasi Waktu	Agenda Kegiatan
1.	Sesi I	10 Menit	Pre Test
2.	Sesi II	20 Menit	Review Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi di Institusi Akademi Kebidanan
3.	Sesi III	30 Menit	Diskusi Kelompok (Metode Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi di Akademi Kebidanan)
4.	Sesi IV	40 Menit	Pemaparan Hasil Diskusi Kelompok
5.	Sesi V	10 Menit	Penutup dan Evaluasi
TOTAL DURASI WAKTU PADA PERTEMUAN I : 110 MENIT			

BAB II

PENGANTAR PENDIDIKAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI DI INSTITUSI AKADEMI KEBIDANAN



SESI I
PRE TEST

A. TUJUAN

Mencari tahu kapasitas pengetahuan umum (*general knowledge*) maupun pengetahuan yang lebih mendalam (*specific knowledge*) dari mahasiswa berkaitan dengan integritas, perilaku anti korupsi dan kemanfaatannya di dalam institusi akademi kebidanan.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan

C. METODE

Pre Test Tertulis

D. MATERI

Bahan Pre Test :

1. Integritas dan anti korupsi dalam kegiatan asuhan kebidanan;
2. Konsep etikolegal di dalam praktik kebidanan dan contoh-contoh penyimpangan dalam kegiatan asuhan kebidanan secara etika, moral dan hukum;
3. Kemanfaatan pendidikan bagi mahasiswa akademi kebidanan

E. ALAT DAN BAHAN

1. Lembar soal dan lembar jawaban
2. Alat tulis

F. WAKTU

10 (sepuluh) menit

G. AGENDA/PROSES FASILITASI

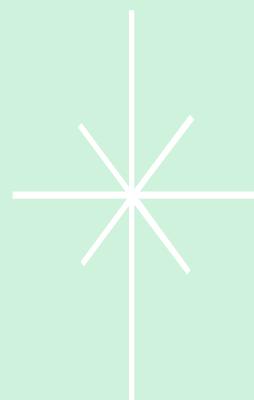
1. Fasilitator memberikan lembar soal dan jawaban yang berisi 3 (tiga) pertanyaan yang berkaitan dengan 3 (tiga) bahan pre test kepada seluruh mahasiswa.

*** PRE TEST ***

- a. Apa yang anda ketahui dan pahami tentang integritas dan anti korupsi dan apa relevansinya di dalam kegiatan asuhan kebidanan ?
- b. Apa yang anda ketahui dan pahami tentang etikolegal dalam praktik kebidanan dan sebutkan masing-masing satu contoh penyimpangan dalam kegiatan asuhan kebidanan yang berkaitan dengan etika, moral dan hukum !
- c. Menurut anda, faktor apa saja yang berperan terhadap terjadinya penyimpangan tersebut dan manfaat apa saja yang anda peroleh dengan mempelajari materi tentang integritas dan anti korupsi dalam kegiatan asuhan kebidanan ?

2. Mahasiswa diminta mengerjakan soal tersebut dengan singkat dan jelas di dalam lembar jawaban yang telah disediakan (tiap jawaban tidak lebih dari 50 kata).
3. Mahasiswa mengerjakan dalam waktu 10 menit dan menyerahkan lembar soal dan jawaban kepada fasilitator setelah waktu berakhir.

සෑම පිටපත් සෙවන ලද මෙහෙයුම් නොවා යුතු වේ



SESI II

REVIEW PENDIDIKAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI DI INSTITUSI AKADEMI KEBIDANAN



A. TUJUAN

Mahasiswa diharapkan :

1. Mampu menguraikan (*describe*) konsep dasar integritas dan anti korupsi bidang kesehatan, khususnya dalam asuhan pelayanan kebidanan;
2. Mampu menerangkan (*explain*) kemanfaatan pendidikan integritas dan anti korupsi di bidang kesehatan bagi mahasiswa akademi kebidanan.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan

C. METODE

Ceramah dan Tanya Jawab Singkat

D. MATERI

Bahan Ceramah :

1. Konsep dasar integritas dan anti korupsi;
2. Pengertian integritas dan anti korupsi dalam kegiatan asuhan kebidanan;
3. Penyimpangan dalam praktik kebidanan dan contoh-contoh penyimpangan dalam kegiatan asuhan kebidanan secara etika, moral dan hukum;
4. Kemanfaatan pendidikan integritas dan anti korupsi bagi mahasiswa.

E. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/laptop
2. LCD projector
3. Papan tulis (*white board*), spidol (*white board marker*) dan penghapus

F. WAKTU

20 (dua puluh) menit

G. AGENDA/PROSES FASILITASI

1. Fasilitator melakukan *review* tentang integritas dan anti korupsi di bidang kesehatan, khususnya dalam asuhan pelayanan kebidanan serta kemanfaatan pendidikan integritas dan anti korupsi di bidang kesehatan bagi mahasiswa akademi kebidanan.
2. Fasilitator memberikan contoh berbagai kejadian yang berhubungan dengan praktik pelayanan bidang kesehatan dalam asuhan kebidanan yang termasuk berintegritas dan anti korupsi serta yang kurang berintegritas dan mengarah ke tindakan korupsi.

MATERI I

❖ KONSEP DASAR INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI ❖

1. Pengertian Integritas

Integrasi berasal dari bahasa Inggris *integrate* artinya mengintegrasikan, menyatupadukan, menggabungkan atau mempersatukan. Berdasarkan pengertian istilah tersebut, maka pendidikan integrasi di Indonesia dikenal dengan pendidikan terpadu. Integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Siswa yang memiliki integritas lebih berhasil ketika menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin formal maupun pemimpin nonformal (Departemen Pendidikan, 2007).

2. Nilai Dasar Integritas dalam Pendidikan

Suatu budaya pada lingkup masyarakat akademik penting untuk memiliki integritas dalam pencarian kebenaran dan pengetahuan dengan mengaruskan para intelektual memiliki pribadi yang jujur dalam pelajaran, pengajaran, penelitian dan pelayanan. Integritas memiliki lima nilai dasar yang terdiri dari kejujuran, kepercayaan, kewajaran, *respect* dan tanggung jawab. Lima hal yang merupakan pilar dalam integritas adalah :

a. Kejujuran (*Honesty*)

Kegiatan dalam lingkungan akademik yang terdiri dari pengajaran, pembelajaran, penelitian, yang merupakan realisasi dari rasa hormat dan tanggungjawab. Kebijakan institusi pendidikan diharapkan memiliki aturan yang seragam tentang tindakan berbohong (akademik), penipuan, pencurian dan lainnya. Kejujuran harus melingkupi mahasiswa, staf pengajar dan dimulai dari diri sendiri.

b. Kepercayaan (*Trust*)

Suatu iklim saling percaya akan mendorong terjadinya pencapaian tertinggi potensi orang-orang yang ada di dalamnya karena dapat dilakukan pertukaran ide dengan bebas. Hanya dengan kepercayaan kita dapat percaya atas hasil penelitian orang lain, bekerja sama dengan berbagai individu dan berbagi informasi.

MATERI I

KONSEP DASAR INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI

c. Kewajaran (*Fairness*)

Diperlukan evaluasi yang adil dan akurat antara anggota akademi. Bagi mahasiswa, komponen yang penting dari keadilan adalah kredibilitas, harapan yang jelas dan konsisten, adanya respon dari ketidakjujuran.

d. *Respect*

Sebuah komunitas akademik yang memiliki integritas mengakui partisipasi orang lain dalam proses pembelajaran dan menghormati berbagai pendapat serta ide.

e. Tanggung Jawab (*Akuntabilitas*)

Tanggung jawab dalam institusi pendidikan selayaknya dipikul bersama, individu diharapkan bertanggung jawab atas kejujuran mereka sendiri dan harus mencegah dan berusaha untuk mencegah pelanggaran oleh orang lain.

3. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral (psikomotorik).

4. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi

Prinsip-prinsip anti korupsi pada dasarnya merupakan langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan agar laju pergerakan korupsi dapat dibendung bahkan diberantas. Di dalam konteks korupsi ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab (*Akuntabilitas*)

Prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Akuntabilitas dimasukkudkan agar semua langkah dan kebijakan yang diambil oleh sebuah otoritas dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini mensyaratkan adanya undang-undang yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban tersebut.

b. Keterbukaan (*Transparansi*)

Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, kedua sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi dalam konteks ini merupakan bagian dari kejujuran untuk saling menjunjung kepercayaan yang terbina antar individu.

MATERI I

KONSEP DASAR INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI

c. Kewajaran (*Fairness*)

Fairness merupakan salah satu prinsip antikorupsi yang mengedepankan kepatutan atau kewajaran, ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak manipulasi. Prinsip fairness akan teraktualisasi secara signifikan apabila didukung oleh “Prinsip Meritokrasi”, yaitu sebuah sistem yang menekankan pada kualitas, kompetensi dan prestasi seseorang.

d. Kebijakan Anti Korupsi

Kebijakan merupakan suatu upaya untuk mengatur tata interaksi dalam ranah sosial. Korupsi sebagai bentuk kejahanan luar biasa yang mengancam tata kehidupan berbangsa telah memaksa setiap Negara membuat undang-undang untuk mencegahnya.

e. Kontrol Kebijakan

Kontrol terhadap kebijakan dapat dilakukan oleh semua lembaga kontrol seperti : lembaga legislatif, yudikatif, LSM, mahasiswa, media massa, bahkan seluruh komponen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pemberantasan korupsi.

5. Bentuk-Bentuk Korupsi

Menurut Joel Krieger, terdapat 4 bentuk korupsi yang sering mewarnai sistem organisasi atau lembaga pemerintahan yaitu :

a. Penyuapan (*Bribery*)

Penyuapan merupakan sebuah bentuk perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan maksud agar penerimaan pemberian tersebut mengubah dengan maksud agar penerimaan pemberian tersebut mengubah perilaku sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab yang dapat berbentuk uang, rujukan, hak-hak istimewa atau berupa barang yang berharga.

b. Penggelapan (*Embezzlement*) dan pemalsuan (*Fraud*)

Penggelapan dan pemalsuan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan tindak pencurian dan pemalsuan uang, properti, atau barang berharga oleh seorang yang diberikan amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti atau barang berharga.

c. Pemerasan (*Extortion*)

Pemerasan merupakan penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama.

d. Nepotisme (*Nepotism*)

Nepotisme merupakan bentuk tindak kriminal yang memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan dan bukan karena kemampuannya.

MATERI II

PENGERTIAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI DALAM KEGIATAN ASUHAN KEBIDANAN

1. Pengertian Integritas dalam Kegiatan Asuhan Kebidanan

Pengertian “Asuhan Kebidanan” adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Maka tujuan pelayanan asuhan kebidanan tidak sekedar melindungi dan mempromosikan kesehatan ibu dan bayinya, tetapi juga membantu perempuan dan keluarganya untuk dapat memperoleh penyesuaian emosional menghadapi kehamilan dan persalinan, serta memastikan ibu memperoleh pengetahuan, keterampilan dan informasi yang cukup untuk memasuki masa pengasuhan anak (*motherhood*) dengan peran dan tanggungjawab yang tepat.

Sehingga “Pengertian Integritas dalam Asuhan Kebidanan” merupakan suatu keadaan untuk menjaga mutu pelayanan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan secara profesional, adil, efektif dan efisien. Konsep integritas ini berkaitan dengan kode etik kebidanan dan standar kompetensi yang ditetapkan bagi profesi bidan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Contoh Penerapan Integritas dalam Asuhan Kebidanan adalah dalam pelayanan bidan yang berkaitan dengan aspek promotif dan preventif, maka bidan harus memiliki kemampuan untuk menjaga kondisi kesehatan perempuan sepanjang siklus reproduksinya termasuk perempuan hamil untuk tetap sehat bahkan kalau bisa ditingkatkan dan kemungkinan komplikasi bisa dicegah. Selain itu, bidan harus mampu untuk menemukan sedini mungkin kemungkinan terjadinya komplikasi dan juga dapat mengatasinya dengan tepat. Jika komplikasi tetap terjadi, maka bidan harus mampu meminimalisir efek, dampak dan risiko fatalitas, morbidity serta mortalitasnya dan mendampingi dalam proses pemulihan kesehatan kembali. Bidan harus mampu melakukan kerjasama secara Tim dan rujukan ketika terjadi kondisi patologis, dalam hal ini bidan harus dibekali pula dengan kemampuan komunikasi, advokasi, kemampuan fasilitasi, pengembangan kemitraan/jejaring kerja serta kemampuan dalam penggerakan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.

2. Pengertian Anti Korupsi dalam Kegiatan Asuhan Kebidanan

Pengertian “Anti Korupsi di dalam Asuhan Kebidanan” merupakan suatu tindakan dalam memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan aturan/pedoman yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip standar praktik kebidanan dan kode etik profesi. Dimana aturan di dalam pelaksanaan kode etik profesi bidan dan standar kompetensi bidan ini telah diatur di dalam Kepmenkes 369/MENKES/SK/III/2007. Adanya peraturan ini dapat digunakan sebagai kendali kontrol untuk menghindari terjadinya bentuk-bentuk kegiatan penyelewengan dan kecurangan yang mengarah pada bentuk tindakan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan anti korupsi di dalam pelaksanaan pembelajaran kegiatan asuhan kebidanan bagi para calon bidan di Akademi Kebidanan, sehingga dari sedini mungkin pendidikan anti korupsi ini diterapkan, maka semakin kecil pula kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi.

MATERI III

❖ PENYIMPANGAN DALAM PRAKTIK KEBIDANAN ❖

1. Penyimpangan dalam Praktik Kebidanan

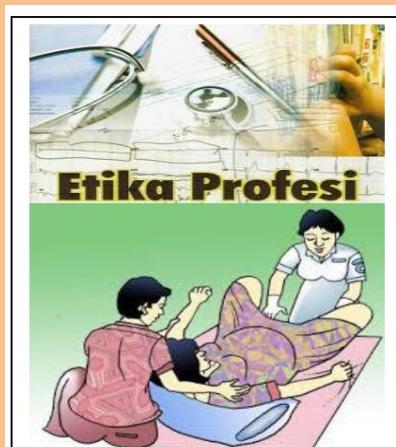
Pelaksanaan “**Praktik Kebidanan**” memiliki definisi yaitu suatu implementasi dari ilmu kebidanan yang didasari etika dan kode etik bidan secara mandiri oleh bidan kepada perempuan, keluarga dan komunitasnya. Penyimpangan yang terjadi di dalam praktik kebidanan yang sering terjadi selama ini adalah masih sering dijumpainya pelayanan bidan dengan seadanya, lamban dengan disertai adanya pemungutan biaya yang mahal. Hal yang dilematis ini terjadi ketika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan meningkat, terutama pelayanan bidan, tidak didukung dengan keahlian dan keterampilan bidan untuk membentuk suatu mekanisme kerja pelayanan yang baik. Dimana dalam melakukan praktik kebidanan, seorang bidan harus berpedoman pada Kepmenkes Nomor 900/MENKES/S/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Tugas dan wewenang bidan ini secara sistematis telah diuraikan di dalam Bab V Pasal 14 sampai dengan Pasal 20, yang garis besarnya mencakup tentang kewajiban seorang bidan dalam menjalankan prakteknya, berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan, berupa pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, setiap penyimpangan yang dilakukan oleh bidan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik bidan dalam menjalankan profesinya menurut standar kompetensinya tersebut dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Karena sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktek kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai dari keyakinan filosofi profesi dan masyarakat. Selain itu bidan juga berperan dalam memberikan persalinan yang aman, memastikan bahwa semua pertolongan persalinan mempunyai pengetahuan, keterampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih.

2. Contoh Penyimpangan dalam Kegiatan Asuhan Kebidanan

KEDIRI - Kasus aborsi yang berujung kematian terjadi di Kediri. Novila Sutiana (21), warga dari Dusun Gegeran, Desa/Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur, tewas setelah berusaha untuk bisa menggugurkan janin yang dikandungnya. Ironisnya, korban tewas setelah mendapat suntikan obat perangang oleh bidan dari puskesmas.

Akibat perbuatan tersebut, Bidan Endang diancam dengan pasal 348 KUHP tentang kasus pembunuhan. Hukuman yang diberikan ini masih diperberat mengingat profesinya sebagai tenaga medis bidan. Selain itu, polisi menjeratnya dengan UU Kesehatan No.23/1992. Belum dapat diketahui secara pasti sudah berapa lama bidan itu membuka praktik aborsi.



Gambar 2.1 Contoh Kasus Penyimpangan oleh Bidan

MATERI IV

❖ KEMANFAATAN PENDIDIKAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI ❖

1. Manfaat Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa

Keterlibatan para mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus, memiliki manfaat, baik untuk individu mahasiswanya sendiri maupun untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan yang ada di dalam kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.

Agar mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi maka pertama kali mahasiswa tersebut harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi di dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan memahami korupsi serta prinsip-prinsip dari anti korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi.

Dengan demikian tujuan dari penyelenggaraan pendidikan integritas dan anti korupsi ini adalah membentuk kepribadian yang berintegritas tinggi serta tidak koruptif pada diri pribadi mahasiswa dan membangun semangat serta kompetensinya sebagai bagian *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.



SESI III

DISKUSI KELOMPOK (METODE PENDIDIKAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI DI AKADEMI KEBIDANAN)



A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat mendiskusikan metode pembelajaran integritas dan anti korupsi yang sesuai dan relevan dengan pendidikan di Akademi Kebidanan masing-masing;
2. Mahasiswa dapat menjelaskan contoh dari masing-masing metode pembelajaran integritas dan anti korupsi sesuai dengan pendidikan di Akademi Kebidanan; dan
3. Mahasiswa dapat memecahkan masalah dari kasus yang ditemukan sesuai dengan metode pembelajaran yang telah didiskusikan dan disepakati tersebut.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan

C. METODE

1. Diskusi Kelompok
2. Curah Pendapat

D. MATERI

Bahan Diskusi :

1. Metode pembelajaran integritas dan anti korupsi di Akademi Kebidanan;
2. Contoh metode pembelajaran integritas dan anti korupsi; dan
3. Kasus-kasus permasalahan integritas dan korupsi dalam asuhan kebidanan.

E. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer / Laptop
2. Internet
3. Modul Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi Kebidanan



F. WAKTU

30 (tiga puluh) menit

G. AGENDA/PROSES FASILITASI

1. Fasilitator membagi mahasiswa menjadi 4 kelompok. Secara berurutan mahasiswa harus menyebutkan angka 1 sampai dengan 4, mahasiswa kelima kembali menyebutkan angka 1 dan seterusnya. Mahasiswa dengan nomor yang sama berkumpul dalam satu kelompok.
2. Fasilitator memberikan 8 topik metode pembelajaran integritas dan anti korupsi, meliputi :
(1) Diskusi Kelas, (2) Studi Kasus, (3) Skenario Perbaikan Sistem, (4) Diskusi Film, (5) Laporan Investigasi, (6) Eksplorasi Tematik, (7) Pembuktian Kebijakan Pemerintah dan (8) Media Pembelajaran. Berdasarkan topik tersebut, Fasilitator mengundi 8 materi topik untuk dibagikan ke dalam 4 kelompok, sehingga masing-masing kelompok mendapatkan 2 topik bahasan untuk didiskusikan.
3. Setiap kelompok mendiskusikan materi yang telah diberikan sesuai dengan topik masing-masing disertai dengan contoh metode pembelajaran serta kasus permasalahan integritas dan korupsi dalam asuhan kebidanan menurut topik metode pembelajaran yang ada.
4. Setiap kelompok membuat bahan presentasi dengan menggunakan power point.

MATERI I

❖ METODE PEMBELAJARAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI ❖

1. Metode Pembelajaran (*Learning Methods*)

a. Diskusi Kelas

Tujuan : untuk menumbuhkan kepekaan (*awareness*) dan membangun kerangka berfikir (*framework of thinking*). Kegiatan : penyampaian oleh dosen dan mendiskusikan konsep-konsep terkait integritas dan anti korupsi.

b. Studi Kasus

Tujuan : untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisa atas dasar konsep-konsep yang diberikan. Disisipkan pada setiap pertemuan perkuliahan untuk setiap pembahasan. Kegiatan : mendiskusikan kasus – kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi dan penyimpangan integritas, kasus faktor penyebab korupsi dan penyimpangan integritas, kasus dampak korupsi dan penyimpangan integritas, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, dan sebagainya.



MATERI I

❖ METODE PEMBELAJARAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI ❖

c. Skenario Perbaikan Sistem

Tujuan : Memberikan rangsangan kepada mahasiswa agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata (*problem solving*). Kegiatan : dosen memberikan satu bahan diskusi untuk didiskusikan oleh kelompok mahasiswa. Mahasiswa diharapkan membuat skema perbaikan sistem yang bisa menyelesaikan masalah korupsi dan penyimpangan integritas yang selalu terjadi pada kasus tersebut.

d. Diskusi Film

Tujuan : menggunakan media film sebagai media pembelajaran melalui kekuatan audiovisual. Kegiatan : memutar film dokumenter tentang perilaku yang berintegritas dan anti korupsi, kemudian mendiskusikan dengan mahasiswa.

e. Laporan Investigasi

Tujuan : mahasiswa memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah tindak korupsi dan penyimpangan integritas yang nyata terjadi di lingkungan sekitar atau daerah setempat, serta membuat laporan korupsi yang efektif dan *impactful*. Kegiatan : merupakan investigasi lapangan yang dilakukan dalam kurun waktu beberapa minggu. Kelompok mahasiswa menentukan tindak korupsi dan penyimpangan integritas disertai lokasinya, melakukan investigasi dengan teknik yang benar, menyusun laporan berisi kasus, data dan analisis konseptual, mempresentasikannya di kelas. Mahasiswa dapat menggunakan kamera, video dan *recorder* untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai bukti valid.

f. Eksplorasi Tematik

Tujuan : membangun cara berfikir (*way of thinking*) yang komprehensif dalam menggali sebuah kasus. Kegiatan : mahasiswa melakukan observasi terhadap sebuah kasus korupsi dan penyimpangan integritas atau perilaku koruptif, kemudian menganalisis dari berbagai perspektif sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya. Mahasiswa juga bisa melakukan observasi perbandingan perspektif atau cara penyelesaian terhadap satu jenis kasus yang serupa dari masyarakat atau negara yang berbeda.



MATERI I

❖ METODE PEMBELAJARAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI ❖

g. Pembuktian Kebijakan Pemerintah

Tujuan : memantau realisasi janji pemerintah sebagai bentuk integritas. Kegiatan : kelompok mahasiswa melakukan pengamatan, penelitian ke lapangan untuk melihat kesesuaian janji pemerintah yang disosialisasikan melalui kampanye/spanduk/ iklan/pengumuman prosedur di berbagai instansi dengan realisasi di lapangan.

h. Media Pembelajaran

Tujuan : menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka gerakan anti korupsi dan peningkatan integritas. Kegiatan : kelompok mahasiswa mewujudkan kreatifitasnya dalam mendesain berbagai macam produk yang bisa menjadi media pembelajaran integritas dan anti korupsi.

2. Contoh Metode Pembelajaran Integritas dan Anti Korupsi



Contoh Studi Kasus Masalah Integritas dan Anti Korupsi

Berikut ini adalah contoh pertanyaan untuk studi kasus terkait masalah integritas dan anti korupsi yang terjadi dalam kampus. Berikan pendapat saudara tentang permasalahan yang ada di bawah ini :



1. Beberapa saat menjelang ujian, seorang mahasiswa mendatangi dosenya secara khusus dan memberikan bingkisan kepada dosen tersebut. Menurut pendapat anda, bagaimakah sikap mahasiswa tersebut bila dikaitkan dengan sikap yang berintegritas ? Berikan alasannya !
2. Saudara termasuk salah satu anggota kelompok yang mendapatkan tugas dari dosen untuk membuat makalah. Dua hari menjelang masa tenggat, belum ada upaya dari kelompok untuk mulai membuat makalah tersebut. Didorong oleh rasa khawatir dan tanggung jawab, saudara mengambil alih tanggung jawab kelompok dan mengerjakan makalah tersebut sendiri. Menurut pendapat anda, bagaimakah sikap saudara dalam kasus tersebut dikaitkan dengan tindakan korupsi yang dilakukan ? Berikan alasannya !



MATERI I

❖ METODE PEMBELAJARAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI ❖

3. Kasus-Kasus Permasalahan Integritas dan Korupsi dalam Asuhan Kebidanan

Studi Kasus Permasalahan Integritas dan Korupsi dalam Asuhan Kebidanan

>> Berikut ini adalah contoh studi kasus terkait masalah integritas dan anti korupsi yang terjadi dalam asuhan kebidanan. Berikan penjelasan saudara tentang permasalahan yang ada di bawah ini :

KASUS MALPRAKTEK BIDAN

Kasus dugaan malpraktek kembali terjadi. Di Jember Jawa Timur, seorang ibu muda mengalami luka robek di bagian anusnya, hingga tidak bisa buang air. Diduga korban yang kini harus buang air besar melalui organ kewanitannya, disebabkan kelalaian bidan yang masih magang di puskesmas setempat menangani persalinannya. Kini kasus dugaan malpraktek ini ditangani Dinas Kesehatan Kota Jember.

Sumber :

<http://www.indosiar.com/patroli/89714/usa-i-persalinan-organ-wanita-robek>

Bidan Pustu Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Yt, diduga melakukan malpraktik sehingga telah mengakibatkan seorang bayi pasiennya meninggal dunia setelah diobati.

Sumber :

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2009/06/05/30027/Bidan.Pustu.Dituduga.Lakukan.Malpraktek>



**A. TUJUAN**

1. Mahasiswa mampu memaparkan hasil analisis dari metode pembelajaran integritas dan anti korupsi yang sesuai dan relevan dengan pendidikan di Akademi Kebidanan;
2. Mahasiswa mampu menyampaikan gagasan dan pendapatnya di depan audiens dengan efektif dan efisien, serta dapat menjelaskan apabila ada pertanyaan.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan

C. METODE

1. Presentasi
2. Diskusi dan Tanya Jawab

D. MATERI

Topik yang telah didiskusikan dalam kelompok

E. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer / Laptop
2. LCD dan layar untuk presentasi
3. Papan tulis (*white board*), spidol (*white board marker*) dan penghapus

F. WAKTU

40 (empat puluh) menit

G. AGENDA/PROSES FASILITASI

1. Masing-masing kelompok mempersiapkan bahan presentasinya. Presentasi tiap kelompok berlangsung selama 10 menit dan dilanjutkan dengan diskusi.
2. Mahasiswa merekam semua hasil diskusi serta komentar, masukan dan saran perbaikan yang diberikan oleh kelompok lainnya untuk memperkaya kajian yang telah dibuat.
3. Mahasiswa masing-masing kelompok membuat simpulan hasil presentasi dan diskusi.

SESI V

PENUTUP DAN EVALUASI



A. TUJUAN

Memberikan simpulan dan menggarisbawahi pentingnya penanaman konsep integritas dan anti korupsi di bidang kesehatan, khususnya dalam kegiatan asuhan kebidanan yang diberikan sedini mungkin dalam bentuk pendidikan bagi mahasiswa di Akademi Kebidanan.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan

C. METODE

1. Diskusi
2. Tanya Jawab

D. MATERI

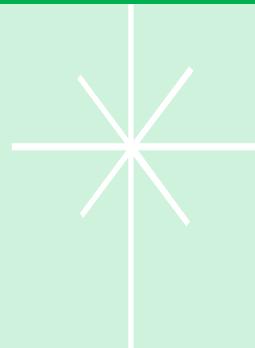
Berbagai topik dan contoh serta kasus terkait permasalahan pendidikan integritas dan anti korupsi yang telah didiskusikan oleh para mahasiswa.

E. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer / Laptop dan LCD
2. Papan tulis (*white board*), spidol (*white board marker*) dan penghapus

F. WAKTU

10 (sepuluh) menit



G. AGENDA/PROSES FASILITASI

1. Fasilitator memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah dibahas dan memperbaiki jawaban dari berbagai pertanyaan yang dilontarkan.
2. Fasilitator memberikan batasan waktu penyelesaian tugas revisi dalam bentuk makalah.
3. Fasilitator menutup sesi kegiatan pembelajaran untuk hari pertama.

**TABEL JADWAL PELAKSANAAN FASILITASI PENDIDIKAN
INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI DI AKADEMI KEBIDANAN**

TABEL 1.2 PERTEMUAN II :

No.	Sesi Kegiatan	Durasi Waktu	Agenda Kegiatan
1.	Sesi I	10 Menit	Review Pertemuan Ke-1
2.	Sesi II	40 Menit	Pendalaman Studi Kasus Integritas dan Anti Korupsi di Akademi Kebidanan (Empat Kasus <i>Continuum of Care</i>)
3.	Sesi III	40 Menit	Presentasi Kelompok dan Tanya Jawab
4.	Sesi IV	10 Menit	Evaluasi dan Penutup
TOTAL DURASI WAKTU PADA PERTEMUAN II : 100 MENIT			

BAB III

ORIENTASI PENDALAMAN KONSEP PENDIDIKAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI BAGI MAHASISWA AKADEMI KEBIDANAN



SESI I

REVIEW PERTEMUAN KE-1

A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep dasar integritas dan perilaku antikorupsi di dalam asuhan kebidanan dan kemanfaatannya di dalam institusi akademi kebidanan, serta
2. Mahasiswa dapat menerangkan metode pendidikan integritas dan anti korupsi yang sesuai dengan pembelajaran di institusi akademi kebidanan disertai analisis contoh kasusnya.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan

C. METODE

Ceramah dan Tanya Jawab Singkat

D. MATERI

Bahan Ceramah :

1. Integritas dan antikorupsi dalam kegiatan asuhan kebidanan;
2. Kemanfaatan pendidikan bagi mahasiswa akademi kebidanan;
3. Metode pendidikan integritas dan anti korupsi di institusi akademi kebidanan.

E. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer
2. LCD Proyektor
3. Spidol
4. Papan Tulis

F. WAKTU

10 (sepuluh) menit

G. AGENDA/PROSES FASILITASI

1. Fasilitator melakukan review tentang konsep pendidikan integritas dan anti korupsi bagi mahasiswa akademi kebidanan disertai dengan contoh kasusnya yang terjadi di dalam penyelenggaraan pembelajaran asuhan kebidanan.
2. Mahasiswa diminta memberikan penjelasan dan melakukan analisis dengan memberikan tanggapan dan komentar sesuai dengan hasil review fasilitator.
3. Mahasiswa menyimpulkan hasil review dan memberikan point-point penting di dalam konsep pendidikan integritas dan anti korupsi di dalam institusi akademi kebidanan.

SESI II

PENDALAMAN STUDI KASUS INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI DI AKADEMI KEBIDANAN (EMPAT KASUS *CONTINUUM OF CARE*)



A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat *menginterpretasi* permasalahan dari kasus-kasus yang diberikan dengan perspektif integritas dan anti korupsi di dalam asuhan kebidanan; serta
2. Mahasiswa dapat *membandingkan (komparasi)* antara berbagai kasus yang telah ada untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan

C. METODE

Diskusi Kelompok dan Studi Kasus

D. MATERI

Bahan Diskusi Kelompok dan Studi Kasus :

1. Peran mahasiswa dalam mencegah terjadinya korupsi di bidang pendidikan kebidanan.
2. Permasalahan dalam kasus *continuum of care* pelayanan asuhan kebidanan;
3. Konsep integritas dan anti korupsi di bidang kesehatan serta pelanggaran yang dilakukan di dalam proses *continuum of care* berkaitan dengan integritas dan anti korupsi;

E. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer / Laptop
2. Internet
3. LCD Proyektor

F. WAKTU

40 (empat puluh) menit

G. AGENDA/PROSES FASILITASI

1. Peserta dibagi menjadi empat kelompok
2. Pembagian kelompok dilakukan dengan meminta masing-masing peserta menyebutkan angka “1”, “2”, “3”, dan “4” secara berurutan. Setelah peserta ke X sudah menyebutkan angka “4”, maka peserta ke Y menyebutkan kembali angka “1”.
3. Peserta yang mendapatkan angka “1”, lalu bergabung dengan peserta lainnya yang juga mendapatkan angka serupa menjadi kelompok (1). Peserta yang mendapatkan angka “2” bergabung dengan peserta lainnya yang juga mendapatkan angka yang serupa menjadi kelompok (2) dan seterusnya untuk kelompok (3) sampai dengan kelompok (4).
4. Masing-masing kelompok diberi satu pokok bahasan terkait permasalahan integritas dan anti korupsi di dalam pelaksanaan *continuum of care* pada pelayanan asuhan kebidanan (Diskusi Kelompok (1) : Topik Pendidikan, Diskusi Kelompok (2) : Topik Kehamilan, Diskusi Kelompok (3) : Topik Persalinan dan Diskusi Kelompok (4) : Topik Neonatal).
5. Masing-masing kelompok diminta untuk melakukan studi kasus dan mendiskusikan topik-topik tersebut dengan mencari referensi maupun literatur yang sesuai dengan topik yang dibahas melalui internet dan lain-lain sebagai bahan analisis.

Sebagai gambaran, di bawah ini merupakan contoh kasus-kasusnya :

DISKUSI I

(TOPIK : PENDIDIKAN)

Seorang mahasiswa ketika melakukan praktik klinik kebidanan di lahan praktik, memperoleh 5 kasus persalinan secara pandang, 3 kasus hanya melahirkan plasenta sedangkan yang ditolong secara mandiri 1 kasus. Menyadari target yang harus di peroleh selama praktek, maka ketika membuat pelaporan ia memasukkan data partus pandang dan pendampingan sebagai bagian dari pencapaian mandiri.

DISKUSI II

(TOPIK : KEHAMILAN)

Kasus terjadi di suatu BPM X, dimana ada seorang ibu bernama Ny. S yang sedang hamil 8 bulan memeriksakan kehamilannya. Ny. S bekerja sebagai buruh di pabrik tekstil. Dari hasil pemeriksaan Ny. S termasuk dalam kondisi baik dan tidak ada masalah, sehingga biaya yang dibutuhkan dalam batas normal sebesar Rp 50.000,-. Namun Ny. S meminta kepada Bidan X untuk menaikkan nominal kwitansi menjadi Rp 150.000,-, sebagai bukti klaim kepada Pabrik tempat Ny. S bekerja. Di Pabrik tersebut mempunyai aturan bagi karyawan yang melakukan pemeriksaan kehamilan diberikan penggantian biaya sebesar Rp 50.000,- sampai dengan Rp 200.000,-. Bidan X itu mengabulkan permintaan pasien tersebut dengan alasan agar Ny. S tetap periksa di Bidan X.

DISKUSI III (TOPIK : PERSALINAN)

Seorang ibu umur 25 tahun hamil anak kedua yang bertempat tinggal di Desa Wonosalam Semarang merasakan mules-mules dan sudah mengeluarkan lendir darah. Suaminya, Tn. Andi memanggil Bidan Praktik Mandiri (BPM) sesampai di BPM, hanya ditemui oleh bidan pengganti karena bidan pengelola (yang punya BPM) tidak ada di tempat. Bidan pengganti datang ke rumah ibu dan melakukan pemeriksaan dengan hasil TD : 110/70 mmHg, N: 84 x/menit, RR: 20x/menit, S: 36,8 °C, Pemeriksaan fisik masih dalam batas normal, pemeriksaan dalam : pembukaan lengkap, effacement 100%....., dari bidan pengganti akan dilakukan pertolongan persalinan di rumah mengingat kondisi ibu tidak memungkinkan dibawa ke BPM tetapi atas instruksi dari bidan pengelola, pasien harus dibawa ke BPM walaupun kepala sudah nampak di introitus vagina. Dengan tegopoh-gopoh dan menahan agar bayi tidak lahir di mobil maka bidan pengganti melakukan segala upaya untuk sampai di BPM. Selama perjalanan ibu tidak tahan untuk meneran, namun bidan pengganti menyarankan agar tidak meneran terlebih dahulu dan menginstruksikan untuk miring bergantian. Sesampai di BPM dengan tergesa-gesa pasien diangkat dan diletakkan di bed dan seketika itu juga bayi lahir normal dan sehat tanpa persiapan diri dan alat. Alasan bidan pengelola menginstruksikan bidan pengganti untuk membawa ibu di BPMnya adalah jika bayi lahir dirumah maka bidan tidak mendapatkan klaim dari BPJS. Setelah 30 menit bayi lahir, tidak terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta, kemudian bidan melakukan manual plasenta tapi plasenta lahir tidak lengkap dan mengalami perdarahan. Bidan memberitahukan kondisi pasien pada keluarga untuk dirujuk di rumah sakit swasta yang menurut bidan pengelola rumah sakit tersebut fasilitasnya lebih lengkap daripada rumah sakit negeri. Sebenarnya pasien adalah peserta BPJS yang bila dirawat di rumah sakit negeri tidak dikenakan biaya namun bidan menginstruksikan di rumah sakit swasta supaya bidan mendapatkan fee (karena pengiriman pasien ke RS tersebut).

DISKUSI IV (TOPIK : NEONATAL)

Peristiwa ini berawal saat Ibu A yang sedang hamil 9 bulan, ini kehamilan anak ke 3, ia mengalami kenceng-kenceng dan mengeluarkan lendir darah, selanjutnya suaminya berembus dengan ibu mertua yang mendapat informasi bahwa di Bidan B menerima persalinan dengan BPJS. Maka diantarlah Ibu A kesana. Satu jam kemudian lahirlah seorang bayi perempuan mungil. Selanjutnya bayi dikeringkan dan disusukan ke ibu. Setelah itu bayi dipakaikan baju yang disediakan dari bidan. Selama di tempat bidan kondisi ibu dan bayi baik, sehingga kesokan harinya diperbolehkan pulang. Ironisnya, saat pulang keluarga dibebani biaya untuk mengganti perlengkapan bayi yang telah digunakan. Bidan menganjurkan 1 minggu kemudian ibu & bayi untuk datang kontrol. Satu minggu kemudian ibu datang ke tempat Bidan B bersama bayinya, saat itu bayi diberikan imunisasi Hepatitis B dan dibebani biaya imunisasi tersebut.

SESI III

PRESENTASI KELOMPOK DAN TANYA JAWAB



A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan hasil pembahasan berbagai permasalahan yang ditunjukkan dari empat studi kasus yang telah diberikan; serta
2. Mahasiswa dapat menerangkan dan menganalisis *lesson learning* yang diperoleh dari tiap kasus untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan dari masing-masing topik permasalahan.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan (Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3 dan Kelompok 4)

C. METODE

Diskusi Kelompok dan Tanya Jawab

D. MATERI

Bahan Diskusi Kelompok dan Tanya Jawab :

1. Peran mahasiswa dalam mencegah terjadinya korupsi di bidang pendidikan kebidanan.
2. Permasalahan dalam kasus *continuum of care* pelayanan asuhan kebidanan;
3. Konsep integritas dan anti korupsi di bidang kesehatan serta pelanggaran yang dilakukan di dalam proses *continuum of care* berkaitan dengan integritas dan anti korupsi;

E. ALAT DAN BAHAN

1. Spidol
2. LCD Proyektor
3. Komputer / Laptop
4. Papan Tulis

F. WAKTU

40 (empat puluh) menit

G. AGENDA/PROSES FASILITASI

1. Masing-masing kelompok membuat bahan presentasi dari materi topik bahasan dan contoh kasus yang telah diberikan yang dikembangkan ke dalam pembahasan terkait pendidikan integritas dan anti korupsi di dalam pelayanan asuhan kebidanan pada institusi akademi kebidanan dengan menggunakan teori “Triangle Fraud” (berdasarkan hasil studi kasus dari kelompok masing-masing).
2. Setiap kelompok diminta untuk menganalisis kasus yang telah diberikan untuk membuat *lesson learning* sebagai point penting pembelajaran yang dimasukkan ke dalam bahan presentasi (berdasarkan hasil studi kasus dari kelompok masing-masing).
3. Presentasi pada setiap kelompok diberikan waktu 10 menit untuk presentasi hasil diskusi kelompok masing-masing.
4. Tanya jawab antar kelompok saat presentasi dan di akhir presentasi, masing-masing dari kelompok menyimpulkan hasil studi kasusnya.

SESI IV

EVALUASI DAN PENUTUP



A. TUJUAN

Mengevaluasi pengetahuan mahasiswa tentang topik yang sudah disampaikan.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan (Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3 dan Kelompok 4)

C. METODE

1. Post Test
2. Pemberian Tugas

D. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer / Laptop
2. Kertas jawaban untuk post test dan alat tulis
3. LCD Proyektor

E. WAKTU

10 (sepuluh) menit

F. AGENDA/PROSES FASILITASI

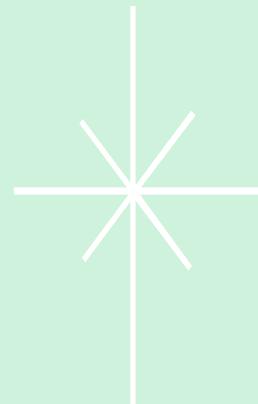
1. Fasilitator memberikan kesimpulan dari keseluruhan hasil studi kasus dan juga presentasi kelompok mengenai materi yang telah dibahas dan memperbaiki jawaban dari pertanyaan-pertanyaan presentasi kelompok yang belum tepat.
2. Fasilitator membagikan lembar evaluasi / kertas jawaban (Post Test) kepada seluruh mahasiswa dan mengumpulkan hasilnya setelah semua mahasiswa selesai mengisi.
3. Fasilitator memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk mendalami studi kasus mengenai pendidikan integritas dan anti korupsi di dalam penyelenggaraan asuhan kebidanan untuk persiapan *role playing* pada pertemuan berikutnya.
4. Fasilitator menutup pertemuan pada hari kedua ini.

*** SOAL POST TEST ***

- a. Sebutkan masing-masing 1 contoh kasus pelanggaran integritas dan kasus korupsi di dalam penyelenggaraan asuhan kebidanan yang sering terjadi !
- b. Bagaimana peran mahasiswa dalam mencegah terjadinya pelanggaran integritas dan korupsi, terutama di dalam penyelenggaraan pendidikan di institusi kebidanan !
- c. Menurut anda, apakah penyelenggaraan pendidikan di institusi kebidanan ini sudah baik ? berikan alasannya !



♪♪♪ SELAMAT MENGERJAKAN ... ♪♪♪



**TABEL JADWAL PELAKSANAAN FASILITASI PENDIDIKAN
INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI DI AKADEMI KEBIDANAN**

TABEL 1.3 PERTEMUAN III (PART 1)

No.	Sesi Kegiatan	Durasi Waktu	Agenda Kegiatan
1.	Sesi I	10 Menit	Review Pertemuan Ke-2
2.	Sesi II	20 Menit	Diskusi Internal Kelompok
3.	Sesi III	40 Menit	<i>Role Playing</i>
4.	Sesi IV	10 Menit	Kesimpulan dan Evaluasi
TOTAL DURASI WAKTU PADA PERTEMUAN III (PART 1) : 80 MENIT			



BAB IV

PRAKTIK PENGENALAN INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN DI AKADEMI KEBIDANAN



SESII

REVIEW PERTEMUAN KE-2

A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat menggunakan pemahamannya tentang konsep integritas dan anti korupsi dalam menganalisis kasus-kasus faktual; dan
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi problem-problem yang berkaitan dengan integritas dan anti korupsi dari kasus-kasus yang dipelajari.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan

C. METODE

Ceramah Kelas

D. MATERI

Bahan Ceramah :

1. Kegiatan-kegiatan dalam pelayanan asuhan kebidanan;
2. Kasus-kasus penyimpangan dan pelanggaran integritas dan permasalahan korupsi di dalam pendidikan dan pelayanan asuhan kebidanan;
3. Peran mahasiswa akademi kebidanan di dalam mencegah terjadinya pelanggaran integritas dan permasalahan korupsi dalam penyelenggaraan pendidikan.

E. ALAT DAN BAHAN

1. LCD Proyektor
2. Komputer

F. WAKTU

10 (sepuluh) menit

G. AGENDA/PROSES FASILITASI

Fasilitator melakukan review tentang hasil pembahasan di pertemuan sebelumnya mengenai orientasi pendalaman konsep pendidikan integritas dan anti korupsi bagi mahasiswa akademi kebidanan, hasil diskusi kelompok dan peran mahasiswa.

(KASUS PELANGGARAN INTEGRITAS BIDAN)

*** CONTOH REVIEW KASUS ABORSI ***

Aborsi di dalam perspektif kebidanan jelas bertentangan dengan kode etik bidan Indonesia. Seperti pemberian pelayanan yang tidak sesuai dengan kewenangan bidan yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan. Ketentuan tentang hukum aborsi di dalam hukum pidana positif Indonesia diatur di dalam KUHP (*Lex Generalis*) dan Undang-Undang Kesehatan (*Lex Spesialis*). KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apa pun juga dan oleh siapapun. Sanksi berlaku bagi bidan yang melanggar kode etik dan hak/kewajiban bidan yang telah diatur oleh organisasi profesi. Bagi bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Permenkes RI No. 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan.



SESI II

DISKUSI INTERNAL KELOMPOK



A. TUJUAN

Mahasiswa dapat mempersiapkan *role playing* masing-masing kelompok.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan

C. METODE

Diskusi Kelompok

D. MATERI

Bahan Diskusi Kelompok : Studi Kasus Integritas dan Anti Korupsi di Akademi Kebidanan
(Empat Kasus *Continuum of Care*) :

1. Topik Pendidikan;
2. Topik Kehamilan;
3. Topik Persalinan; dan
4. Topik Neonatal.

E. ALAT DAN BAHAN

1. Alat Tulis
2. Perlengkapan sesuai peran masing-masing

F. WAKTU

20 (dua puluh) menit

G. AGENDA/PROSES FASILITASI

1. Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3 dan Kelompok 4 diatur dalam posisi berkelompok.
2. Masing-masing kelompok berdiskusi mengenai *role playing* kelompoknya.
3. Masing-masing kelompok menyiapkan peralatan sesuai dengan perannya masing-masing.

SESI III

ROLE PLAYING



A. TUJUAN

1. Mahasiswa dalam masing-masing kelompok dapat *mengidentifikasi* pikiran dan perasaan yang dialaminya ketika memerankan sebuah peran; dan
2. Mahasiswa dapat *menerangkan* dan *menjelaskan* pikiran serta perasaan yang dialaminya dengan bahasanya sendiri.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan (Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3 dan Kelompok 4)

C. METODE

Role Playing

D. ALAT DAN BAHAN

1. Alat yang dibutuhkan sesuai peran masing-masing
2. Papan Tulis
3. LCD Proyektor
4. Spidol

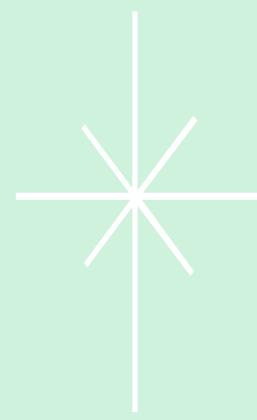
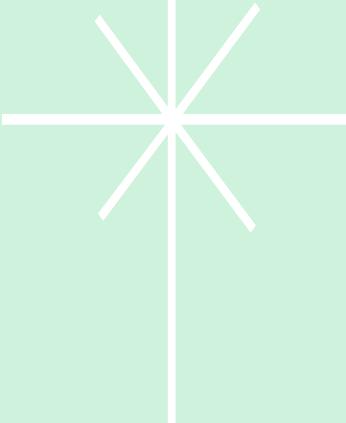
E. WAKTU

40 (empat puluh) menit

F. AGENDA/PROSES FASILITASI

1. *Role playing* berupa drama, mahasiswa dibagi menjadi empat kelompok dan memainkan peran. Peran yang dimainkan sesuai dengan kebutuhan kelompoknya.
2. Tema di dalam drama ini adalah pelanggaran integritas dan tindakan korupsi di pendidikan dan pelayanan asuhan kebidanan. Judul di dalam kasus ini tidak ditetapkan dan setiap kelompok bebas mencari judul sendiri.

3. Setelah setiap kelompok menampilkan drama (masing-masing kelompok diberikan waktu pementasan drama 10 menit), kelompok lain boleh bertanya atau memberikan komentar mengenai drama yang ditampilkan masing-masing kelompok.
4. Setiap kelompok diberikan kesempatan menyampaikan testimoni apa yang dirasakannya saat memerankan peranan tertentu.



SESI IV

KESIMPULAN DAN EVALUASI



A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat *membuat* point-point penting atau kata-kata kunci (*keywords*) dari semua materi yang sudah dipelajarinya; dan
2. Mahasiswa dapat *merangkai* kata-kata kunci tersebut menjadi sebuah kesimpulan yang dapat diingatnya dengan baik.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan (Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3 dan Kelompok 4)

C. METODE

Ceramah

D. ALAT DAN BAHAN

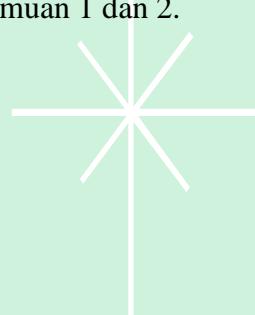
1. Komputer / Laptop
2. LCD Proyektor

E. WAKTU

10 (sepuluh) menit

F. AGENDA/PROSES FASILITASI

1. Fasilitator mengulas kembali tentang materi yang telah disampaikan, baik menambahkan maupun melakukan klarifikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang perlu diklarifikasi.
2. Peserta dapat mengajukan pertanyaan tentang materi yang telah dibahas.
3. Fasilitator menyimpulkan materi yang telah dibahas selama pertemuan 1 dan 2.
4. Fasilitator menutup pertemuan ke-3 (part 1).



**TABEL JADWAL PELAKSANAAN FASILITASI PENDIDIKAN
INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI DI AKADEMI KEBIDANAN**

TABEL 1.4 PERTEMUAN III (PART 2)

No.	Sesi Kegiatan	Durasi Waktu	Agenda Kegiatan
1.	Sesi V	15 Menit	Preview Outline Praktik Integritas dan Anti Korupsi dalam Pendidikan Akademi Kebidanan
2.	Sesi VI	20 Menit	<i>Brainstorming</i> dan Analisis Kasus Praktik Integritas dan Anti Korupsi dalam Pendidikan Akademi Kebidanan
3.	Sesi VII	40 Menit	Review Hasil Analisis Kasus dan Tanya Jawab
4.	Sesi VIII	15 Menit	Rencana Tindak Lanjut dan Evaluasi (Post Test)
TOTAL DURASI WAKTU PADA PERTEMUAN III (PART 2) : 90 MENIT			

BAB V

REVIEW PENDALAMAN PRAKTIK INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN DI AKADEMI KEBIDANAN



SESI V

**PREVIEW OUTLINE PRAKTIK INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI
DALAM PENDIDIKAN AKADEMI KEBIDANAN**

A. TUJUAN

1. Mahasiswa memiliki outline pedoman di dalam pembelajaran terkait praktik integritas dan anti korupsi yang diselenggarakan oleh institusi akademi kebidanan, dan
2. Mahasiswa memiliki informasi dan pemahaman tentang pendidikan integritas dan anti korupsi secara komprehensif dan dapat mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki di dalam kehidupan sehari-hari.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan

C. METODE

Ceramah Kelas

D. MATERI

Bahan Ceramah :

1. Outline modul pendidikan integritas dan anti korupsi kebidanan;
2. Konsep penerapan praktik integritas dan anti korupsi dalam asuhan kebidanan;
3. Pemanfaatan pendidikan integritas dan anti korupsi bagi mahasiswa akademi kebidanan

E. ALAT DAN BAHAN

1. LCD Proyektor
2. Komputer / Laptop

F. WAKTU

15 (lima belas) menit

G. AGENDA/PROSES FASILITASI

1. Fasilitator memberikan preview mengenai outline gambaran praktik pendidikan integritas dan anti korupsi di dalam asuhan kebidanan dan pemanfaatannya.
2. Mahasiswa menyimpulkan hasil preview fasilitator dan memberikan tanggapan / umpan balik (*feedback*) mengenai konsep pendidikan integritas dan anti korupsi dalam asuhan kebidanan berdasarkan outline yang diberikan.
3. Fasilitator merangkum hasil umpan balik (*feedback*) dari mahasiswa dan memfasilitasi seluruh peserta mahasiswa untuk melakukan analisis pemanfaatannya.
4. Mahasiswa menyusun outline kegiatan pelaksanaan integritas dan anti korupsi yang telah dilakukan di institusi akademi kebidanan, baik dalam bidang pendidikan maupun praktik pada asuhan kebidanan.

Tabel berikut ini adalah contoh outline gambaran praktik pendidikan integritas dan anti korupsi yang dilakukan di institusi akademi kebidanan :

Tabel 1.5 Outline Praktik Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi
di Institusi Akademi Kebidanan

No.	Standar Kompetensi Pendidikan Kebidanan	Outline Kegiatan Pelaksanaan Integritas dan Anti Korupsi
1.	Mampu u/ berperilaku professional, beretika dan bermoral serta tanggap terhadap nilai sosial budaya dalam praktik kebidanan	Melaksanakan praktik kebidanan & berpedoman pada standar profesi, kode etik kebidanan serta Undang-Undang/Peraturan yang berlaku
2.	Mampu berkomunikasi efektif dng perempuan, keluarga, masyarakat, sejawat dan profesi lain di dalam upaya peningkatan derajat kes. ibu dan anak dlm pelayanan kebidanan	Berkomunikasi dengan tepat selama memberikan asuhan, baik secara lisan, tertulis, atau melalui media elektronik & mengutamakan kepentingan pasien serta keilmuan dalam praktik kebidanan
3.	Mampu dalam memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman dan holistik dan memperhatikan pula di aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan menyusui, bayi baru lahir, balita dan kesehatan reproduksi (kespro) dalam kondisi normal berdasarkan standar praktik kebidanan dan kode etik profesi	a. Mengumpulkan data yang akurat dan sesuai dengan keadaan klien. b. Menginterpretasikan data berdasarkan temuan anamnesis & riwayat pemeriksaan akurat. c. Menyusun rencana asuhan bersama dng klien sesuai dengan kondisi yang dialami. d. Melakukan tindakan kebidanan sesuai rencana. e. Melakukan evaluasi asuhan kebidanan. f. Mendokumentasikan asuhan kebidanan

4. Mampu untuk memberikan upaya penanganan tatalaksana kegawatdaruratan sesuai kewenangannya
- a. Melakukan penanganan kegawatdaruratan di kasus maternal dan neonatal yang relevan.
 - b. Melakukan kolaborasi dan rujukan pada kasus yang memerlukan tindakan penanganan diluar kewenangan (kasus *emergency*).
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi tindakan kegawatdaruratan kebidanan.
 - d. Mendokumentasikan tindakan kebidanan yang diberikan (pengarsipan)

Di dalam standar kompetensi pendidikan kebidanan, bidan diharuskan memberikan asuhan komprehensif, mandiri dan bertanggung jawab terhadap asuhan yang berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan perempuan. Berikut adalah penjelasan ilustrasi dari model praktik asuhan kebidanan yang dilakukan sesuai dengan standar kompetensi kebidanan :



Gambar 5.1 Model Praktik Asuhan Kebidanan

SESI VI

BRAINSTORMING DAN ANALISIS KASUS PRAKTIK INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN AKADEMI KEBIDANAN



A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat melakukan curah pendapat (*brainstorming*) terkait permasalahan dari kasus-kasus integritas dan anti korupsi di dalam asuhan kebidanan; dan
2. Mahasiswa dapat menganalisis (*analyze*) serta memecahkan permasalahan yang terkait dengan praktik integritas dan anti korupsi dalam pendidikan akademi kebidanan.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan

C. METODE

Diskusi Kelompok

D. MATERI

Bahan Diskusi Kelompok :

1. Kasus-kasus penyimpangan integritas dan anti korupsi dalam kegiatan asuhan kebidanan;
2. Pendidikan integritas dan anti korupsi di bidang kesehatan; dan
3. Teknik/metode pelaksanaan *problem solving* permasalahan kesehatan.

E. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer / Laptop
2. Internet
3. LCD Proyektor

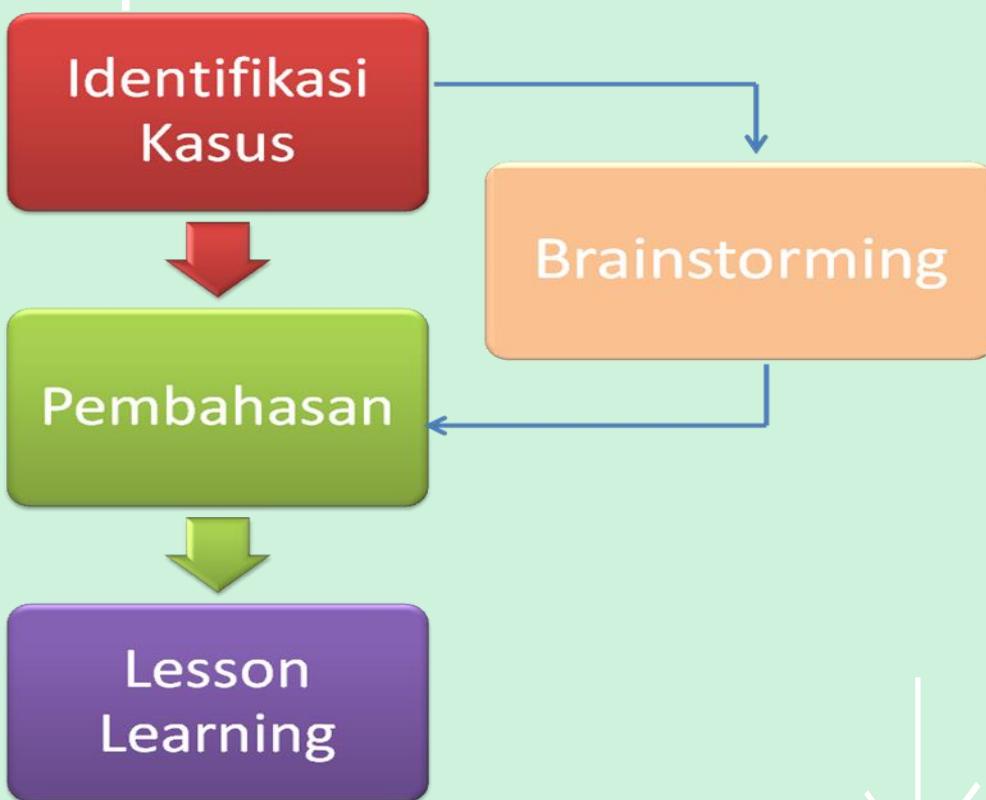
F. WAKTU

20 (dua puluh) menit

G. AGENDA/PROSES FASILITASI

1. Fasilitator membagi mahasiswa menjadi 4 kelompok. Secara berurutan mahasiswa harus menyebutkan angka 1 sampai dengan 4, mahasiswa kelima kembali menyebutkan angka 1 dan seterusnya. Mahasiswa dengan nomor yang sama berkumpul dalam satu kelompok.
2. Fasilitator memberikan 4 contoh kasus praktik penyimpangan integritas dan anti korupsi dalam pendidikan dan asuhan kebidanan. Sehingga masing-masing kelompok melakukan *brainstorming* dan analisis terhadap 1 contoh kasus yang diberikan.
3. Setiap kelompok mendiskusikan 1 contoh kasus yang diberikan dalam waktu 20 menit.
4. Masing-masing kelompok membuat bahan presentasi dengan menggunakan power point.

Di bawah ini sistematika *problem solving* dari hasil *brainstorming* dan analisis kasus praktik penyimpangan integritas dan anti korupsi dalam pendidikan dan asuhan kebidanan :



Gambar 5.2 Sistematika *Problem Solving* Permasalahan Integritas dan Anti Korupsi



SESI VII

REVIEW HASIL ANALISIS KASUS DAN TANYA JAWAB

A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat melakukan review hasil analisis kasus yang telah didiskusikan; dan
2. Mahasiswa dapat mengkritisi hasil *problem solving* permasalahan kasus, melalui umpan balik (*feedback*) dengan tanya jawab untuk kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan dari masing-masing kasus permasalahan.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan

C. METODE

Diskusi Kelompok dan Tanya Jawab

D. MATERI

Bahan Diskusi Kelompok :

1. Kasus-kasus penyimpangan integritas dan anti korupsi dalam kegiatan asuhan kebidanan;
2. Pendidikan integritas dan anti korupsi di bidang kesehatan; dan
3. Teknik/metode pelaksanaan *problem solving* permasalahan kesehatan.

E. ALAT DAN BAHAN

1. Spidol
2. LCD Proyektor
3. Komputer / Laptop
4. Papan Tulis

F. WAKTU

40 (empat puluh) menit

G. AGENDA/PROSES FASILITASI

1. Masing-masing kelompok membuat bahan presentasi dari hasil analisis kasus yang telah didiskusikan bersama sebelumnya.
2. Setiap kelompok diminta untuk dapat melakukan review terhadap point-point pembahasan (berikan dasar hukum yang jelas) dan hasil *lesson learning* yang diberikan.
3. Presentasi pada setiap kelompok diberikan waktu 5 menit.
4. Di akhir presentasi, setiap kelompok membuka sesi tanya-jawab untuk mengkritisi hasil analisis kasus dari kelompok lainnya dengan alokasi waktu ± 5 menit.
5. Masing-masing dari kelompok menyimpulkan hasil presentasinya.



SESI VIII

RENCANA TINDAK LANJUT DAN EVALUASI (POST TEST)

A. TUJUAN

1. Masing-masing institusi akademi kebidanan memiliki rencana tindak lanjut untuk uji coba penggunaan prototype modul yang dikembangkan bersama dengan AKBID lainnya, dan
2. Untuk menilai hasil uji coba dilakukan evaluasi dengan pemberian instrument post test.

B. PESERTA

Mahasiswa Akademi Kebidanan didampingi dengan Perwakilan Pengelola AKBID

C. METODE

Fasilitasi Partisipatif

D. MATERI

Bahan Fasilitasi Partisipatif :

1. Prototype modul pendidikan integritas dan anti korupsi kebidanan;
2. Draft Rencana Tindak Lanjut (RTL) uji coba modul; dan
3. Instrument uji coba modul (post test) bagi mahasiswa akademi kebidanan;

E. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer / Laptop
2. LCD Proyektor
3. Prototype modul pendidikan integritas dan anti korupsi kebidanan
4. Kertas jawaban untuk post test dan alat tulis

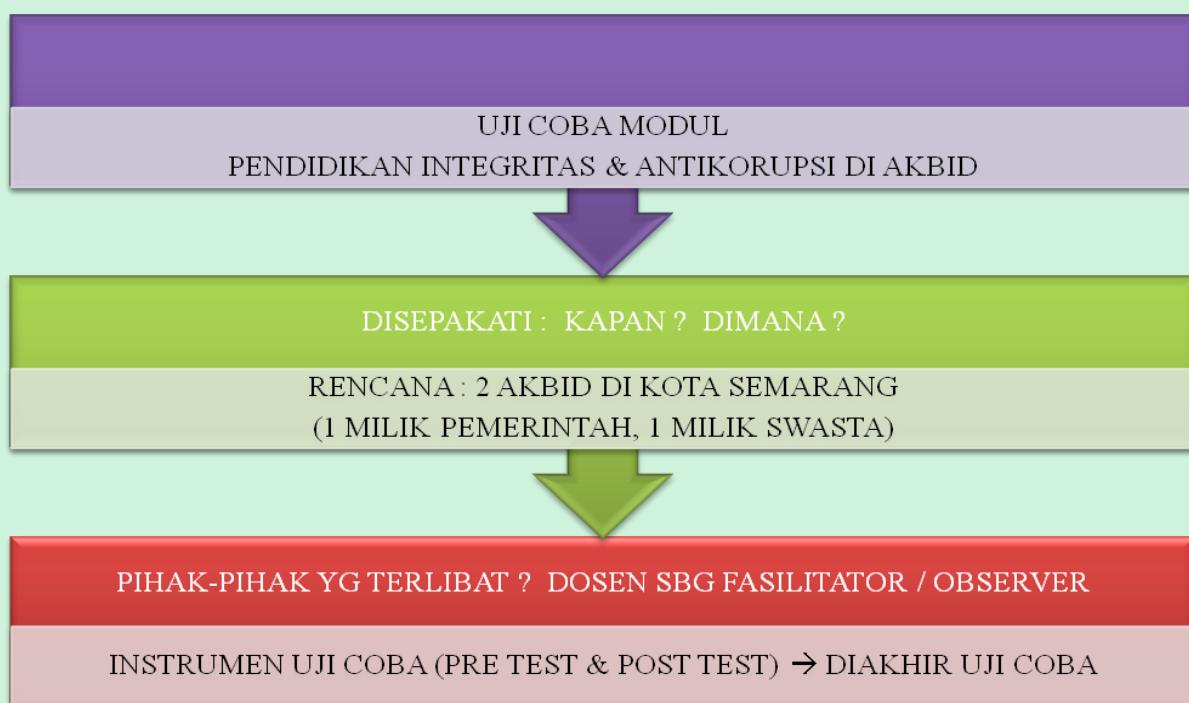
F. WAKTU

15 (lima belas) menit

G. AGENDA/PROSES FASILITASI

1. Fasilitator memberikan kesimpulan dari keseluruhan hasil presentasi kelompok.
2. Fasilitator bersama dengan perwakilan pengelola dari setiap AKBID menyusun draft RTL untuk uji coba berdasarkan prototype modul yang telah dikembangkan.
3. Co-Fasilitator membantu membagikan lembar instrument evaluasi (Post Test) ke seluruh mahasiswa dan mengumpulkan hasilnya setelah semua mahasiswa selesai mengisi.
4. Co-Fasilitator mengumpulkan hasil post test dan fasilitator merangkum hasil penyusunan draft RTL yang telah dibuat untuk kemudian bersama-sama dengan pengelola AKBID menyusun jadwal agenda pertemuan kembali untuk perbaikan dan finalisasi modul dalam bentuk kegiatan “Workshop” sesuai hasil penilaian keseluruhan post test tiap AKBID.
5. Fasilitator menutup pertemuan dan menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak.

Berikut ini disampaikan alur sistematika penyusunan Draft Rencana Tindak Lanjut (RTL) uji coba modul pendidikan integritas dan anti korupsi kebidanan :



Gambar 5.3 Alur Sistematika Penyusunan Draft RTL Uji Coba Modul

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Fenomena praktik korupsi pada profesi bidan makin meluas di beberapa daerah di Indonesia yang merupakan tindakan profesi bidan yang tidak berintegritas. Cerminan perilaku tersebut merupakan realita yang selama ini terjadi pada profesi bidan. Sampai saat ini kurikulum pendidikan anti korupsi dan integritas bagi profesi kesehatan bidan masih sangat terbatas. Kebutuhan akan pendidikan integritas sebagai kurikulum bagi pengelola akademi kebidanan untuk menyiapkan calon profesi bidan dirasakan semakin mendesak seiring dengan makin banyaknya praktik korupsi yang dilakukan pada sektor kesehatan. Disisi lain, upaya untuk pengembangan modul pendidikan integritas dan anti korupsi dalam bidang kesehatan yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro (TIRI) dapat menjadi alternatif replikasi modul untuk menjawab kebutuhan tersebut untuk seluruh akademi kebidanan di Jawa Tengah yang terdiri atas empat tahap pengembangan (pembuatan prototipe modul, ujicoba penerapan, perbaikan draft modul dan penyelesaian akhir modul).

B. SARAN

1. Dengan maraknya kasus korupsi dan penyimpangan integritas di sektor kesehatan, maka perlu adanya pengembangan modul pendidikan integritas dan anti korupsi untuk mahasiswa kebidanan khususnya di Provinsi Jateng.
2. Untuk institusi bidang kesehatan, diperlukan pendidikan integritas dan anti korupsi sebagai kurikulum bagi pengelola AKBID untuk menyiapkan calon profesi bidan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim. 2013. *Ada Bidan Desa Sengaja Lakukan Kegiatan Pungli.* (online), (<http://www.koruptorindonesia.com/lintas-daerah/ada-bidan-desa-lakukan-pungli>, diakses pada tanggal 20 September 2013).
2. Departemen Kesehatan RI. 2000. *Standar Profesi Kebidanan.* IBI. Jakarta.
3. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah. 2012. *Buku Saku Kesehatan Propinsi Jawa Tengah,* Jawa Tengah: Dinkes Jateng.
4. Hermanto. 2013. *Membongkar Dugaan Korupsi Dana Kesehatan di Inhu (Riau),* (online), (<http://buserkriminal.com/?p=2745>, diakses pada tanggal 20 September 2013).
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang standar profesi bidan.
6. Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Ringkasan Eksekutif Data dan Informasi Kesehatan Propinsi Jawa Tengah,* Jakarta: Kemenkes.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Petunjuk Tenkis Jaminan Persalinan.
8. Hari Tri Warsono. 2011. *Remaja Aborsi Tewas Usai Disuntik Bidan,* (online), (<http://news.okezone.com/read/2008/05/18/1/110398/1/remaja-aborsi-tewas-usai-disuntik-bidan>, diakses pada tanggal 22 September 2012). WHO. *The World Health Report: Health Systems Financing,* The Path to Universal Coverage. 2010.